

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PAYAKUMBUH

<sup>1</sup> Fitria Nazmi, <sup>2</sup> Asep Ajidin

<sup>1,2</sup>Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Correspondent author: [fitria.nazmi01@gmail.com](mailto:fitria.nazmi01@gmail.com)

Kota Bukittinggi, 102010, Indonesia

### Abstract

*The purpose of this study was to analyze the process and results of poverty alleviation policy implementation in Payakumbuh City, West Sumatra. Qualitative methods were used to identify the driving factors of poverty alleviation policy implementation from the perspective of policy makers and the poor in Payakumbuh City. Data collection was conducted through semi-structured interviews. Data analysis was conducted using triangulation techniques, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study found that the process of implementing poverty alleviation policies was carried out by the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD). The poor in Payakumbuh City received various assistance, but the implementation of poverty alleviation policies often failed due to inadequate funds, weak supervision, and invalid data. They wanted transparency of aid recipients as well as training and business capital. This study emphasizes the importance of communication and the role of bureaucratic structure in the success of the policy.*

**Keywords: Communication; Disposition; Policy; Poverty Reduction; Resources**

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan hasil implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Metode kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendorong implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari sudut pandang pembuat kebijakan dan masyarakat miskin di Kota Payakumbuh. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa proses dalam implementasi kebijakan penanggulangan dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Masyarakat miskin di Kota Payakumbuh menerima berbagai bantuan, namun implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sering gagal karena dana tidak memadai, lemahnya pengawasan, dan data yang tidak valid. Mereka menginginkan transparansi penerima bantuan serta pelatihan dan modal usaha. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi dan peran struktur birokrasi dalam keberhasilan kebijakan.

**Kata Kunci: Disposisi; Kebijakan; Komunikasi; Penanggulangan Kemiskinan; Sumber Daya**

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak warga negara

yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak sehingga masih banyak warga negara yang tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dijelaskan bahwa kewajiban negara untuk membebaskan kondisi masyarakat miskin melalui upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar dan ini menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan ketidakberdayaan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan manusia. Kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang (Monongga et al., 2018) termasuk Indonesia. Sehingga kemiskinan menjadi pembatas antara hak-hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, perlindungan dari hukum, rasa aman, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan yang terjangkau dan serta akses pendidikan dan kesehatan yang layak.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang terus menerus menjadi pembahasan. Menurut Sabarisman (2017), kemiskinan adalah kondisi kehidupan seseorang yang jauh dari kata sejahtera. Sejahtera merupakan keadaan dimana seseorang telah mampu memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan dasar maupun diluar kebutuhan dasar. Pada negara berkembang kemiskinan disebabkan karena ketimpangan atau ketidaksetaraan antara orang kaya dan orang miskin yang disebabkan minimnya akses pendidikan dan kesehatan dan ketidaksetaraan dalam pelaksanaan pembangunan (Itang, 2015). Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Tingginya angka kemiskinan dapat menyebabkan lambatnya proses pembangunan suatu bangsa karena dampaknya yang menyebar dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan. Berbagai program muncul dalam jumlah yang besar dalam kebijakan pengentasan kemiskinan dan telah diimplementasikan di berbagai daerah, namun masalah publik yang terjadi sampai saat ini menyebabkan angka kemiskinan masih tinggi jumlahnya (Hadna & Kartika, 2017). Menurut Huraerah (2013), kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan mengalami beberapa kekeliruan, dimana pemerintah memfokuskan orientasi pada aspek ekonomi dibandingkan dari segi aspek multidimensional yang terbukti menyebabkan kegagalan, karena penanggulangan kemiskinan yang direduksi dari segi ekonomi tidak mewakili permasalahan kemiskinan secara keseluruhan. Selain itu, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah lebih

berfokus kepada kemurahan hati dibandingkan pelaksanaan produktivitas, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi tidak produktif.

Menurut Safhira dan Mukhtar (2023), salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Selain itu, pengentasan kemiskinan masih mejadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Dalam *Outcome Document Trfansforming Our Worrd: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan pertama dari tujuh belas tujuan yang telah disepakati dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030. Karena salah satu indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dilihat dari berapa besar persentase angka kemiskinan yang menyebabkan kemiskinan menjadi isu strategis dalam pembangunan di setiap daerah.

Berdasarkan hasil survei BPS pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 9,36 persen atau 25,90 juta jiwa (BPS, 2023). Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin belum menghasilkan penanggulangan kemiskinan yang signifikan (Saragih, 2015). Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, menggambarkan bahwa bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat menimbulkan kecemburuan sosial yang menyebabkan terjadi konflik karena ketidak tepatan sasaran pemberian bantuan.

Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp. 431,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Walaupun bantuan terus digulirkan oleh pemerintah, namun angka kemiskinan nasional terbilang cukup tinggi. Persentase jumlah penduduk miskin Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 dengan rata-rata penurunan 0,21 persen selama 10 tahun terakhir. Persentase jumlah masyarakat miskin pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang ditandai dengan naiknya angka kemiskinan Kota Payakumbuh dari 5,65 persen menjadi 6,16 persen. Kenaikan angka kemiskinan ini disebabkan oleh Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Kota Payakumbuh. Pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan Kota Payakumbuh menjadi 5,66 persen dibandingkan dengan tahun 2021, walaupun masih di atas target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 juga terjadi penurunan angka kemiskinan Kota

Payakumbuh dari 5,66 persen menjadi 5,44 persen. Penurunan angka kemiskina yang tidak signifikan menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Payakumbuh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Perhitungan persentase penduduk miskin diukur dari segi ekonomi/ pendapatan (daya beli), kesehatan, kepemilikan asset, rumah dan pekerjaan. Hal ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak signifikan dalam penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Istiqamah et al. (2018), pertumbuhan ekonomi seharusnya sejalan dengan menurunnya angka ketimpangan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan, namun pada kenyataannya meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah cenderung meningkatkan angka ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Payakumbuh 2023-2026 salah satu strategi pemerintah daerah yang dilakukan dalam pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan memastikan kelompok masyarakat miskin memperoleh program perlindungan sosial berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Keluarga Usaha Bersama (KUBE) dan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Namun implementasi program penanggulangan kemiskinan belum mampu mengurangi angka kemiskinan di Kota Payakumbuh secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kisaran penurunan angka kemiskinan Kota Payakumbuh selama 10 (tahun) terakhir hanya sebesar lebih kurang 0,5% pertahun.

Menurut Satibi dan Sudrajat (2019), banyak faktor kebijakan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, antara lain: pendekatan, strategi, dan pelaksana serta keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Idealnya, berbagai faktor tersebut harus tercakup dalam satu dokumen lengkap, sehingga mampu mengatasi masalah kemiskinan secara tepat dan komprehensif. Jika salah satu faktor terabaikan, maka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan akan terbuka lebar, yang kemudian dapat berimplikasi pada penurunan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan kebijakan yang ditetapkan oleh daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari penjelasan diatas, fenomena kemiskinan di Kota Payakumbuh masih tergolong tinggi. Berbagai intervensi program dan kegiatan telah dilaksanakan tetapi belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Dalam penelitian ini digunakan indikator implementasi kebijakan menurut teori Edward III. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan segala bentuk upaya untuk mendapatkan apa yang menjadi target dari tujuan itu sendiri. Menurut Edward III, implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh

sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, komunikasi, serta disposisi atau sikap (Nuriyani & Mia, 2022).

Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini dan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mengatasi tantangan yang ada.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (Banks, 2018). Penelitian ini berfokus pada subjek tertentu dan mengkajinya sebagai studi kasus. Pendekatan studi kasus memberikan gambaran dan ilustrasi komprehensif tentang berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program atau situasi sosial (Rahardjo, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur. Wawancara merupakan komunikasi yang terjadi secara dua arah dimana peneliti akan menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara dan dilakukan dengan lebih leluasa dan tidak terlalu terikat dengan susunan pertanyaan pada pedoman wawancara (Pike, 2019). Wawancara dilakukan secara mendalam kepada kepala dinas sosial, kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan, dan kepala bidang perumahan serta tiga keluarga miskin di Kota Payakumbuh. Skrip wawancara dikembangkan dengan merujuk kepada teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dengan menggunakan tiga langkah, yaitu kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022). Keabsahan data diperhatikan melalui berbagai strategi, termasuk triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan, ketekunan pengamatan dengan melakukan pengamatan secara berulang dan mendalam, serta kejelasan audit trail dengan mencatat semua langkah penelitian secara jelas dan sistematis.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Payakumbuh: Perspektif Faktor Komunikasi**

Menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)

Dalam mengkaji studi implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel-variabel atau faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa model implementasi yang dapat digunakan sebagai acuan, diantaranya adalah sebagai berikut;

Grindle (1980) yang dikutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15) dijelaskan bahwa mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan. (dalam Elwan.L.O.M, 2011:22). Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu: a) Dilihat dari prosesnya, yakni yang dapat diperiksa pada tingkat program yang spesifik dan dana yang dialokasikan, serta b) Dilihat dari hasil yang dicapai oleh implementasinya kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; dan b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi.

Lebih lanjut, menurut argumen Grindle (dalam Elwan.L.O.M, 2011: 22) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (*implementability*). Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan aspek konteks implementasi kebijakan (*contexs of policy implementation*). (Supriadin et al., 2020)

Demikian halnya dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan disuatu wilayah. Seperti Informasi terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh disampaikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang didalamnya ikut serta dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta dinas sosial. Kebijakan dan program yang disusun sudah termaktub dalam beban tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selain itu, juga diikutsertakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya seperti Badan Zakat Nasional (Baznas). Terdapat perbedaan laporan dan pembaharuan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) antara dinas sosial dengan dinas pendidikan yang berakibat pada program KIP, KIS, dan lainnya salah sasaran. Masyarakat Miskin Sudah ditinjau oleh pihak kelurahan dan Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk kemudian akan diberikan bantuan sosial. Sudah didata oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman untuk mengetahui apakah rumah yang dihuni sekarang sudah layak atau belum, serta dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk mengetahui sumber air minum, baik untuk dikonsumsi maupun untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK).

### **Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Payakumbuh: Perspektif Faktor Sumber Daya**

Komponen yang dijadikan pedoman untuk verifikasi dan validasi oleh dinas sebagai pembuat kebijakan terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari dinas sosial, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan, data kependudukan dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta anggaran untuk menjalankan program pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil dan bayi stunting untuk dinas kesehatan. Dinas sosial dengan sukses memberikan bantuan berupa fasilitas pengembangan usaha ekonomi produktif bagi warga miskin ekstrem dan warga miskin yang ada di data Percepatan Pensasaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pada triwulan I tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem di Kota Payakumbuh berada pada 0 persen. Dinas Sosial meningkatkan anggaran untuk mengadakan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Dinas perumahan Kota Payakumbuh bersama dinas Perumahan dan Permukiman (PKP) juga sudah melangsungkan proyek pengurangan jumlah rumah tidak layak huni dengan target 100 rumah dibangun setiap tahunnya. Masyarakat miskin di Kota Payakumbuh sudah memperoleh bantuan modal usaha yang diterima sekali dalam tiga bulan melalui Badan Zakat Nasional (Baznas), menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), dan sembako beras. Bantuan dari dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupa bantuan bahan bangunan serta bantuan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berupa pemasangan sambungan air minum.

### **Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Payakumbuh: Perspektif Faktor Disposisi/Sikap**

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh secara umum sudah baik. Dinas terkait mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagal implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh yaitu seperti dana yang tidak memadai, lemahnya pengawasan dari pimpinan, tidak adanya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga

menjadikan program yang telah disusun salah sasaran, program yang mangkrak, serta faktor dari diri masyarakat itu sendiri yang memiliki "mental miskin". Masyarakat miskin belum puas dengan bantuan yang dihadirkan oleh pemerintah seperti bantuan pendidikan anak, bantuan kesehatan, dan sembako beras. Masyarakat menginginkan bantuan modal usaha agar mereka dapat menghasilkan pendapatan sendiri. Masyarakat juga menginginkan pelatihan-pelatihan keterampilan yang mereka ikuti dievaluasi lebih lanjut oleh dinas terkait agar tidak sia-sia.

### **Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Payakumbuh: Perspektif Faktor Struktur Birokrasi**

SOP kerja dinas terkait dalam implementasi penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh yaitu dinas pendidikan Kota Payakumbuh berkoordinasi secara intens dengan dinas sosial dan kelurahan terkait. Lalu, dinas kesehatan Kota Payakumbuh selalu berkoordinasi dengan dinas sosial, dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), BPJS kesehatan, puskesmas, serta rumah sakit. Kemudian, dinas perumahan Kota Payakumbuh secara berkala berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, RT/RW, LPM, serta pemuka masyarakat. Serta dinas sosial Kota Payakumbuh secara berjenjang berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan ataupun lembaga lain seperti Badan Zakat Nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi jalannya program. Proses penerimaan bantuan terkait implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat miskin di Kota Payakumbuh diawali atas usulan dari kelurahan. Tahap selanjutnya yakni pendataan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi salah satu sumber data. Masyarakat miskin mengungkapkan bahwa mereka menginginkan adanya transparansi dalam hal penerima bantuan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh secara umum baik, namun masyarakat belum puas dengan bantuan yang ada. Mereka menginginkan transparansi penerima bantuan, bantuan modal usaha, dan pelatihan keterampilan yang lebih efektif. Disarankan agar penelitian berikutnya memperbanyak sampel, menggunakan teori implementasi kebijakan yang lebih baru, dan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk hasil yang lebih lengkap dan informatif.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Banks, M. (2018). Using visual data in qualitative research. *Using visual data in qualitative research*, 1-192.
- BPS. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.
- Hadna, A. H., & Kartika, D. (2017). Evaluation of poverty alleviation policy: Can conditional cash transfers improve the academic performance of poor students in Indonesia?. *Cogent Social Sciences*, 3(1), 1295548.
- Huraerah, A. (2013). Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3-13.
- Istiqamah, I., Syaparuddin, S., & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111-126.
- Itang, I. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 16(01), 1-30.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626-642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Manongga, A., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Nuriyani, G. & Mia. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut.
- Pike, M. (2019). *Interviews Instead of Self-Reports? Investigating Cues and Questions for the Detection of Honesty-Humility in Employment Interviews* (Doctoral dissertation, University of Guelph).
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.
- Sabarisman, M. (2017). Identifikasi dan pemberdayaan masyarakat miskin pesisir. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(3).
- Safhira, T., & Mukhtar, S. (2023). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE REGIONAL POVERTY GAP INDEX. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran, dan Akuntansi*, 4(2), 171-183.
- Saragih, J. P. (2015). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45-59.
- Satibi, I., & Sudrajat, U. (2019). Strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 362-381.
- Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>